

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keterbukaan informasi publik memegang peranan penting dalam sistem pemerintahan dan masyarakat modern. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh informasi publik agar dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan. Keterbukaan informasi yang dilaksanakan secara konsisten akan memperkuat asas *good governance* dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara, termasuk institusi Pendidikan.¹ Menurut Sumual dkk, transparansi dalam dunia pendidikan sangat krusial karena sikap transparansi sangat penting untuk menarik kepercayaan Masyarakat.² Sehingga institusi yang terbuka akan lebih mudah mendapat dukungan komunitas. Dengan kata lain, keterbukaan memungkinkan masyarakat yaitu orang tua, siswa, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengawasi dan menilai kinerja lembaga pendidikan sehingga menumbuhkan kepercayaan dan akuntabilitas.

Jika lembaga pendidikan tidak menerapkan keterbukaan informasi, berbagai permasalahan serius dapat timbul. Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa sekitar 28% proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) di tingkat dasar dan menengah masih diliputi praktik pungutan liar yang mencerminkan kurangnya transparansi dalam penerimaan siswa.³ Bahkan, audit KPK atas proyek pembangunan fasilitas sekolah di Jakarta menemukan deviasi anggaran sebesar 31%, sehingga beberapa proyek mengalami keterlambatan dan proses belajar siswa ikut terdampak.⁴ Kasus-kasus tersebut mencerminkan

¹ Kementerian PANRB, "Keterbukaan Informasi Dorong Peran Masyarakat Dalam Pembangunan," September 19, 2023, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/keterbukaan-informasi-dorong-peran-masyarakat-dalam-pembangunan>.

² S.D.M. Sumual et al., "Pentingnya Sikap Transparansi Dalam Pengawasan Pendidikan," *Jurnal OnEdu: Journal of E-Learning and E-Education* 3, no. 4 (2022): 137–45.

³ A. D. Prasetya, "KPK Temukan Ada Pungutan Liar Dalam Proses PPDB Di Level Dasar Dan Menengah," MerahPutih.Com, June 14, 2025, <https://www.merahputih.com/post/read/kpk-temukan-ada-pungutan-liar-dalam-proses-ppdb-di-level-dasar-dan-menengah>.

⁴ A. Akbar, "KPK Temukan Proyek Sekolah Di Jakarta Terlambat, Belajar Siswa Terdampak," Detik News, May 23, 2025, <https://news.detik.com/berita/d-7929574/kpk-temukan-proyek-sekolah-di-jakarta-terlambat-belajar-siswa-terdampak>.

bahwa minimnya akses informasi dapat memicu penyimpangan manajemen sekolah dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan.

Fenomena keterbatasan akses informasi juga dikonfirmasi oleh Susisanti dkk dalam penelitiannya yang menemukan hubungan positif signifikan antara transparansi dan partisipasi komunitas sekolah.⁵ Temuan serupa ditunjukkan oleh Azkiyah dkk dalam studi di Jakarta Timur yang menyebut bahwa transparansi memiliki pengaruh sebesar 42% terhadap keterlibatan orang tua dalam mendukung proses pendidikan.⁶ Dengan ini, ketertutupan informasi tidak hanya memengaruhi citra lembaga, tetapi juga melemahkan fungsi partisipatif warga sekolah. Permasalahan ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban formal, melainkan kebutuhan mendasar agar sekolah dapat membangun kepercayaan dan akuntabilitas publik secara berkelanjutan.

Dalam konteks organisasi, budaya organisasi sekolah merujuk pada sekumpulan nilai, norma, dan praktik yang dianut oleh seluruh anggota komunitas sekolah mulai dari kepala sekolah, guru, staf administrasi, hingga siswa.⁷ Budaya yang positif dan inklusif berfungsi sebagai panduan dalam interaksi sehari-hari dan mendorong terciptanya iklim yang terbuka. Budaya organisasi yang mendukung transparansi dan komunikasi terbuka dapat meningkatkan kepercayaan antar anggota organisasi. Dengan adanya budaya yang mendorong pengungkapan informasi dan dialog dua arah, setiap pemangku kepentingan di sekolah akan merasa lebih terlibat dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan. Sebaliknya, budaya organisasi yang tertutup cenderung menimbulkan ketidakpercayaan dan hambatan inovasi, sehingga partisipasi warga sekolah menjadi minim.

⁵ S. Susisanti, S. Syamsudduha, and M. Musdalifa, "Hubungan Transparansi Dan Akuntabilitas Dengan Partisipasi Komunitas (Studi Di SMA Negeri 26 Bone)," *Jurnal Manajemen Pendidikan* 17, no. 1 (2022): 22–35.

⁶ Z. Azkiyah, N. Fuad, and M. Matin, "The Influence of Transparency and Trust on Parental Participation in MTS Negeri Kecamatan Cakung, Jakarta Timur," *Jurnal Manajemen Dan Supervisi Pendidikan* 9, no. 2 (2025).

⁷ R. Rismawati & M.S. Nugraha, "Peran Kepala Sekolah Dalam Membangun Budaya Organisasi Yang Adaptif Terhadap Perubahan," *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 1, no. 1 (2025): 19–32.

Pentingnya kultur sekolah yang terbuka ini juga disoroti dalam konteks iklim pendidikan. Komunikasi yang terbuka dan melibatkan semua pemangku kepentingan terbukti dapat meningkatkan iklim organisasi yang kondusif. Menurut Fahma sebagaimana dikutip oleh Rismawati dan Nugraha menegaskan bahwa komunikasi terbuka dan melibatkan semua pemangku kepentingan dapat meningkatkan iklim organisasi yang kondusif.⁸ Dalam situasi demikian, suasana rapat menjadi lebih egaliter dan partisipatif, sehingga ide dan kritik dapat disampaikan secara bebas. Implikasinya, budaya kerja egaliter dan partisipatif di sekolah mendukung terciptanya transparansi internal dan eksternal, serta memperkuat kerja sama lintas elemen di sekolah.

Di ranah pendidikan secara umum, keterbukaan informasi dan budaya sekolah yang positif berhubungan langsung dengan kepercayaan dan partisipasi warga sekolah. Sumual dkk menekankan bahwa tanpa transparansi, kepercayaan akan terpuruk. Budaya organisasi yang positif, juga menekankan bahwa nilai-nilai transparansi, profesionalisme, dan saling menghargai di kalangan guru akan menumbuhkan kepercayaan antara guru dan siswa.⁹ Akibatnya, siswa dan orang tua merasa lebih aman dan dihormati, sehingga keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran dan kegiatan sekolah meningkat. Maka dari itu, lembaga pendidikan yang menerapkan keterbukaan akan cenderung mendapatkan kepercayaan publik lebih tinggi, serta partisipasi aktif dari orang tua dan siswa dalam mengawasi dan mendukung kualitas pendidikan.

Keterbukaan informasi juga berkorelasi dengan meningkatnya partisipasi masyarakat di lingkungan sekolah. Kementerian PANRB menyatakan bahwa keterbukaan memfasilitasi ruang partisipasi masyarakat secara luas dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan.¹⁰ Artinya, sekolah yang terbuka akan memberi kesempatan kepada komunitas sekolah untuk

⁸ Ibid., 4.

⁹ S.D.M. Sumual et al., "Pentingnya Sikap Transparansi Dalam Pengawasan Pendidikan," *Jurnal OnEdu: Journal of E-Learning and E-Education* 3, no. 4 (2022): 137–45.

¹⁰ Kementerian PANRB (2023), "Keterbukaan Informasi Dorong Peran Masyarakat Dalam Pembangunan."

menyampaikan masukan dan aspirasi mereka. Menurut Bahri dkk sebagaimana dikutip oleh Rismawati & Nugraha mendukung hal ini, di mana forum diskusi dan rapat berkala dengan orang tua serta siswa dapat meningkatkan rasa memiliki dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan sekolah.¹¹ Dengan mekanisme komunikasi dua arah seperti rapat partisipatif dan *feedback* rutin, pelibatan semua pihak dalam kegiatan sekolah menjadi nyata, yang secara berkelanjutan memperkuat iklim keterbukaan dan kepercayaan internal.

Meskipun Undang-Undang KIP 2008 menegaskan hak setiap warga memperoleh informasi publik dan pentingnya *good governance*, penerapan keterbukaan informasi di sekolah ternyata masih menemui kendala nyata. Komisi Informasi DKI Jakarta mengungkap banyak sekolah yang belum mengalokasikan anggaran atau menyusun SOP khusus untuk layanan informasi publik, sehingga kebijakan pelaksanaannya tidak optimal.¹² Kondisi tanpa transparansi ini justru “menyuburkan korupsi dan kesewenang-wenangan” dalam pengelolaan lembaga publik. Fenomena minimnya akses dan akuntabilitas semacam ini menurunkan kepercayaan publik dan partisipasi warga. Perlu ditekankan terlebih dahulu masalah faktual di lapangan seperti rendahnya budaya komunikasi terbuka dan akuntabilitas sekolah sebagai dasar penelitian, bukan langsung berasumsi bahwa semua prosedur sudah berjalan sempurna.

Kajian-kajian terdahulu cenderung berfokus pada aspek regulasi dan implementasi formal PPID, serta pengaruhnya terhadap partisipasi masyarakat, tanpa membedah akar budaya organisasi sekolah. Sebagian besar penelitian lebih menyoroti birokrasi, administrasi, dan struktur layanan informasi publik, sementara dimensi budaya internal seperti nilai-nilai dan asumsi mendasar sekolah kurang disentuh. Padahal, teori budaya organisasi Edgar H. Schein menunjukkan bahwa artefak dan praktik sehari-hari secara efektif “memperkuat nilai-nilai dan asumsi dasar” sebuah lembaga. Kekosongan kajian terkait hal ini

¹¹ R. Rismawati & M.S. Nugraha, “Peran Kepala Sekolah Dalam Membangun Budaya Organisasi Yang Adaptif Terhadap Perubahan,” *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 1, no. 1 (2025), 9.

¹² Komisi Informasi DKI Jakarta, “Optimalisasi Konten Hingga Kualitas Layanan Informasi Jadi Rekomendasi Tim Penilai E-Monev untuk Sekolah di Jakarta,” 2025

menciptakan gap penelitian, bagaimana budaya sekolah melalui artefak, *espoused values*, dan *basic assumptions* secara konkret mendukung atau menghambat keterbukaan informasi publik.

Situasi tersebut membuat SMAN 21 Jakarta menjadi studi kasus menarik. Sekolah unggulan ini tercatat meraih predikat Informatif dalam penilaian Komisi Informasi DKI 2024 dan 2025, yang menunjukkan komitmennya terhadap transparansi. Namun, belum banyak diketahui bagaimana nilai-nilai inti seperti kedisiplinan, kejujuran, dan kebersamaan di SMAN 21 berperan dalam praktik keterbukaan. Menurut Riris, keterbukaan informasi memang membangun kepercayaan antara sekolah dan masyarakat, tetapi bagaimana struktur budaya sekolah memperkuat hal ini masih jarang dikaji.¹³ Penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut dengan menggunakan kerangka untuk memetakan budaya organisasi SMAN 21. Pendekatan ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis-praktis dengan menjelaskan bagaimana budaya sekolah yang positif dapat menumbuhkan transparansi dan kepercayaan publik.

SMAN 21 Jakarta dipilih sebagai lokasi penelitian karena sekolah ini memperoleh predikat Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi DKI Jakarta selama dua tahun berturut-turut, yaitu tahun 2024 dan 2025. Namun, capaian tersebut belum tentu sepenuhnya menggambarkan bahwa keterbukaan informasi telah berjalan tanpa hambatan dalam seluruh aspek kehidupan sekolah. Penghargaan formal dapat menunjukkan keberhasilan administrasi layanan informasi, tetapi belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana budaya organisasi sekolah mendukung praktik keterbukaan dalam interaksi sehari-hari, pola komunikasi internal, maupun partisipasi warga sekolah. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana budaya organisasi di SMAN 21 Jakarta menjadi fondasi dalam membangun keterbukaan informasi publik, bukan hanya pada tataran kebijakan formal tetapi juga dalam praktik keseharian warga sekolah

¹³ Riris, "Manajemen Keterbukaan Informasi Sekolah Guna Membangun Kepercayaan Masyarakat Dalam Pendidikan Di SDIT Qurrota A'yun Kabupaten Ponorogo," *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 9, no. 1 (2025): 44.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Budaya Organisasi dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di SMAN 21 Jakarta”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, penelitian ini difokuskan pada “Peran Budaya Organisasi dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di SMAN 21 Jakarta”. Adapun dengan subfokus mengenai:

1. Nilai-nilai dan norma dasar yang membentuk budaya organisasi di SMAN 21 Jakarta.
2. Penerapan budaya organisasi melalui praktik, kebiasaan, dan simbol-simbol keseharian yang mencerminkan nilai keterbukaan dan kebersamaan di SMAN 21 Jakarta.
3. Peran pola komunikasi internal dan tingkat partisipasi warga sekolah dalam mendukung keterbukaan informasi publik di SMAN 21 Jakarta.

Berdasarkan fokus dan sub fokus penelitian yang telah diuraikan di atas, dapat diajukan beberapa pertanyaan penelitian antara lain:

1. Bagaimana nilai-nilai dan norma dasar membentuk budaya organisasi yang dianut di SMAN 21 Jakarta?
2. Bagaimana budaya organisasi diterapkan dalam praktik, kebiasaan, dan simbol-simbol keseharian yang mencerminkan nilai keterbukaan dan kebersamaan di SMAN 21 Jakarta?
3. Bagaimana pola komunikasi internal dan tingkat partisipasi warga sekolah berperan dalam mendukung keterbukaan informasi publik di SMAN 21 Jakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian diantaranya yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan nilai-nilai dan norma dasar yang membentuk budaya organisasi di SMAN 21 Jakarta.

2. Untuk menganalisis penerapan budaya organisasi melalui praktik, kebiasaan, dan simbol-simbol keseharian yang mencerminkan nilai keterbukaan dan kebersamaan di SMAN 21 Jakarta.
3. Untuk mengkaji peran pola komunikasi internal dan tingkat partisipasi warga sekolah dalam mendukung keterbukaan informasi publik di SMAN 21 Jakarta.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memperkaya literatur dan landasan teori tentang hubungan budaya organisasi dengan keterbukaan informasi publik dalam konteks lembaga pendidikan. Temuan penelitian akan menambah khasanah keilmuan manajemen pendidikan, khususnya dalam memahami bagaimana nilai-nilai organisasi seperti kedisiplinan, kejujuran, kebersamaan, kolaborasi berdampak pada praktik transparansi di sekolah. Dengan ini, dari sisi teoritis penelitian ini mengembangkan kerangka konseptual baru yang mengaitkan budaya organisasi sekolah. Hasil penelitian juga dapat menjadi sumber referensi bagi studi-studi akademik selanjutnya yang mengkaji pengaruh budaya organisasi dalam menciptakan lingkungan sekolah yang terbuka, partisipatif, dan kondusif.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi SMAN 21 Jakarta

Penelitian ini memberikan gambaran konkret mengenai kekuatan dan kelemahan praktik keterbukaan informasi di sekolah. Hasil studi dapat menjadi umpan balik untuk manajemen sekolah dalam mengevaluasi dan mengembangkan kebijakan internal yang menekankan transparansi dan komunikasi terbuka. Temuan ini juga membantu Kepala Sekolah dan staf untuk memahami lebih baik bagaimana nilai-nilai yang ditanamkan disiplin, kejujuran, kebersamaan secara praktis meningkatkan partisipasi warga sekolah.

b. Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan

Penelitian ini meningkatkan kesadaran guru dan staf tentang pentingnya praktik-praktik transparan. Dengan mengetahui bahwa budaya

keterbukaan di sekolah sudah terbukti memupuk kepercayaan antar anggota sekolah, guru dapat termotivasi untuk lebih aktif berbagi informasi dan melibatkan siswa serta orang tua dalam proses pembelajaran.

c. Bagi Dinas Pendidikan

Bagi Dinas Pendidikan, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam merumuskan kebijakan dan program pembinaan sekolah terkait penguatan budaya organisasi yang mendukung keterbukaan informasi publik. Jika praktik budaya organisasi yang diterapkan di SMAN 21 Jakarta dinilai efektif, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk menyusun program-program pelatihan, pendampingan, atau replikasi model pada sekolah lain, sehingga semakin banyak satuan pendidikan yang memiliki budaya organisasi serupa dan berorientasi pada transparansi.

d. Bagi Publik/Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan atau tolok ukur bagi sekolah-sekolah lain di DKI Jakarta yang ingin mengembangkan praktik keterbukaan informasi publik. Dengan mengkaji pengalaman SMAN 21 Jakarta sebagai badan publik informatif, sekolah lain dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai contoh konkret dalam membangun budaya transparansi dan komunikasi yang terbuka, sehingga keterbukaan informasi tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam praktik penyelenggaraan pendidikan.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai referensi awal dalam mengkaji keterkaitan antara budaya organisasi dan keterbukaan informasi publik di lingkungan pendidikan. Temuan dan pendekatan yang digunakan dalam studi ini dapat dijadikan pijakan untuk pengembangan riset lanjutan, baik dalam konteks sekolah yang berbeda maupun dengan pendekatan metodologis yang lebih luas.